



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 31 Maret 2020

Halaman: 1

Realokasi Anggaran, Tambah Insentif Tim Medis

PARLEMENTARIA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

WAKIL rakyat di DPRD Kota Jogja bergerak cepat adanya pandemi Covid-19. Demi meningkatkan pelayanan dan memberikan dukungan kepada tim medis yang berada di garda terdepan, dewan menyiapkan tambahan insentif. Saat ini, Komisi D yang membidangi kesehatan tengah membahas dengan eksekutif.

"Kami sudah usulkan. Nanti Dinas Kesehatan dan pihak terkait akan melakukan perhitungannya," ujar anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Muhammad Ali Fahmi, beberapa waktu lalu.

Fahmi mengungkapkan, guna menambah insentif tersebut, pihaknya juga menyiapkan rencana untuk realokasi anggaran.

Nantinya pihak eksekutif akan mengalihkan beberapa anggaran yang tidak prioritas utama bisa dialihkan untuk menangani Covid-19 ini. "Dari paparan Satuan Gugus Tugas, untuk dana tak terduga senilai Rp 7,73 miliar hanya mencukupi pembiayaan selama satu bulan. Padahal tanggap darurat sampai Mei mendatang," tandasnya.

Oleh karena itu, realokasi anggaran non prioritas atau bisa ditunda akan segera dilakukan. Dari realokasi anggaran ini, Satuan Gugus Tugas diharapkan bisa lebih leluasa. "Termasuk kemungkinan pemberian tambahan untuk pemilik KMS (Kartu Menuju Sejahtera) dan masyarakat rentan lain," kata Fahmi.

► Baca *Realokasi...* Hal 11

Muhammad Ali Fahmi

Sambungan dari hal 1

Hanya saja, skema tambahan bantuan itu masih akan mereka bahas dengan detail. Ini agar ke depan pemanfaatan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini tidak menjadi celah korupsi. "Itu yang sangat penting. Makanya perlu pembahasan lebih lanjut, termasuk melibatkan aparat penegak hukum (APH)," sarannya. Fahmi menjelaskan, ada beberapa anggaran pembangunan dan beberapa mata anggaran yang tidak prioritas bisa dialihkan. Ia memprediksi untuk pengalihan anggaran bisa lebih dari cukup untuk membiayai penanganan. "Kalau anggaran dana tak terduga senilai Rp 7,7 miliar lebih cukup sebulan, tambah Rp 10 miliar lagi kami perkirakan APBD masih mampu," jelasnya. Skema lain, kata Fahmi, bisa dengan memanfaatkan bantuan swasta. Banyak perusahaan yang ia perkirakan akan turut serta jika gerakan masyarakat yang sudah banyak dilakukan saat ini dikoordinasikan eksekutif. "Sudah kami usulkan agar bantuan juga bisa benar-benar menyentuh masyarakat. Makanya Pemkot harus memiliki data valid untuk penanganan Covid-19 ini. Terutama mereka yang rentan karena ekonomi tidak stabil," sarannya. (*/laz/fj)

1.
2.
3.
4.
5.

☐ Netral ☐ Biasa ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005